

# MILITER DALAM DEMOKRASI INDONESIA (PERIODE PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)

**Glenn Kevin Immanuel<sup>1</sup>, Yusa Djuyandi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,

Jl. Ir Soekarno, KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: [glenn23001@mail.unpad.ac.id](mailto:glenn23001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>; [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*This research tries to explain the military in the context of democracy in Indonesia during the Joko Widodo government period. The revocation of ABRI's dual function is a form of military withdrawal from the realm of practical politics. Even though the military has withdrawn from practical politics, the military still has political power that has quite an influence on politics in Indonesia. This can be seen from the inclusion of several retired military officers in Joko Widodo and Ma'ruf Amin's campaign team in 2019. Apart from that, many retired military officers held political and non-political positions during Joko Widodo's government. In fact, several active military officers hold several positions in civil institutions and state-owned enterprises. This certainly has an impact on the tarnishing of democracy in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research methods with library study data collection methods.*

**Keywords:** *Military Politics; Democratisation; Joko Widodo; Government*

## **PENDAHULUAN**

Peran militer dalam politik memiliki keterkaitan erat dengan berjalannya demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru, militer dapat menduduki institusi politik

melalui Dwifungsi ABRI. Lewat Dwifungsi ABRI, militer dapat mengisi dan menduduki jabatan-jabatan politik yang penting, seperti anggota legislatif melalui fraksi ABRI, birokrat non-militer petinggi Badan Usaha Milik

Negara, hingga kepala daerah. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh militer dalam demokratisasi di Indonesia. Terlebih, paradigma keamanan mendominasi stigma jika peran militer dibutuhkan untuk menduduki posisi-posisi vital dalam politik di Indonesia (Efriza, 2019). Keberadaan Dwifungsi ABRI sendiri didayagunakan sebagai pilar rezim Orde Baru, yang mana ini berkembang menjadi justifikasi atas peran militer dalam politik atas dasar untuk menjaga ideologi dan kestabilan kondisi politik negara (Leni, 2013). Berakhirnya Orde Baru dan memasuki era reformasi turut serta menghapus Dwifungsi ABRI yang sudah berlaku sejak lama. Terlebih, fraksi militer menarik keanggotaannya dari lembaga legislatif. Meskipun begitu, militer sendiri masih memiliki daya tarik tersendiri bagi partai politik (Efriza, 2019). Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden ke-7 dari Republik Indonesia membawa pertanyaan baru terkait militer dan demokrasi di Indonesia. Sebagai presiden dengan latar belakang yang bukan berasal dari kalangan militer, Joko Widodo memberikan harapan cerah dalam demokrasi di Indonesia yang tidak hanya bergantung

pada dukungan militer sebagai elite politik. Namun, dinamika antara Joko Widodo dengan militer menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini karena dukungan militer masih dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi Joko Widodo selain dukungan dari partai koalisi.

Efriza (2019) dalam penelitiannya menyebutkan jika keberadaan purnawirawan militer sebagai elit politik di era Reformasi membawa idealisme politik dalam demokrasi Indonesia. Hal ini menyebabkan lemahnya sistem kepartaian dalam demokrasi di Indonesia yang menyebabkan hubungan sipil-militer dapat bergerak ke arah yang negatif. Sedangkan, penelitian Sukmawan & Pedrason (2022), melihat bahwa pemerintah di era Joko Widodo cenderung memiliki pendekatan pragmatis saat mengontrol keberadaan militer dalam demokrasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya purnawirawan atau anggota aktif dari TNI dan Polri yang memiliki jabatan politik maupun non-politik yang vital. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana militer dalam demokrasi di Indonesia menjelang 10 tahun masa

pemerintahan Joko Widodo atau selama dua periode.

### **METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat militer dalam berjalannya demokrasi di Indonesia di era Joko Widodo. Creswell (2014) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan upaya-upaya, seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, dan analisis data, yang mana kemudian ditafsirkan untuk memahami makna dari isu sosial yang ada (Creswell, 2014). Sementara, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan literatur penelitian, berita, maupun pernyataan, sebagai landasan atas data yang hendak dianalisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terpilihnya Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 sebagai Presiden Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena Joko Widodo merupakan presiden terpilih pertama yang berasal dari kalangan sipil sehingga

dianggap sebagai salah satu lambang demokrasi di era reformasi, yang mana sipil dapat menguasai jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Euforia ini disebabkan karena pada Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, melawan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, yang mana Prabowo Subianto sendiri memiliki latar belakang militer (Efriza, 2019). Kemenangan Joko Widodo menyebabkan munculnya harapan publik untuk tercapainya transisi demokrasi ke arah pemerintah yang lebih demokratis dan pro rakyat dengan keberadaan sipil sebagai presiden.

Pada tahun 2017, Joko Widodo juga mendapat simpati dari masyarakat karena mampu menginstruksikan kepada seluruh jajaran prajurit TNI untuk tidak masuk ke dalam ajang politik praktis. Secara terang-terangan, Joko Widodo menyebutkan bahwa TNI milik seluruh masyarakat Indonesia yang tidak terkotak-kotakkan dengan kepentingan politik dan tidak masuk ke dalam politik praktis untuk menjaga netralitasnya. Ucapan ini dianggap sebagai pernyataan Joko Widodo terhadap munculnya isu bahwa beberapa

pihak militer, khususnya Panglima TNI pada saat itu, Gatot Nurmantyo, yang melempar isu terkait komunisme menjelang Pemilu 2019 (BBC News Indonesia, 2017). Selanjutnya di tahun 2023, Joko Widodo kembali melarang aparat TNI dan Polisi untuk terlibat politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Larangan ini diungkapkan Joko Widodo untuk memastikan bahwa TNI dan Polisi memiliki satu visi yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik agar tetap kondusif di tahun politik. Selain itu, Joko Widodo juga melihat adanya situasi yang rawan menjelang pemilu sehingga anggota TNI dan Polri diminta untuk menjaga netralitasnya (BBC News Indonesia, 2017).

Larangan tersebut dinilai penting dalam berjalannya demokrasi di Indonesia, mengingat di masa lalu, Dwifungsi ABRI membuat demokratisasi di Indonesia menjadi terhambat karena aparat bersenjata hadir mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan di Indonesia. Ditambah, militer sendiri pada dasarnya memiliki kekuatan yang besar sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, militer juga masih menjadi salah satu institusi

dengan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Di tahun 2015, angka kepercayaan publik masyarakat terhadap TNI mencapai 90 persen dan menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling tinggi di Indonesia. Peringkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI bertahan hingga tahun 2018, yang mana tingkat kepercayaan publik terhadap militer mencapai 73,5 persen (PinterPolitik.com, 2019). Dapat dilihat jika citra TNI masih didominasi anggapan positif dari masyarakat, yang mana dengan ini militer dapat memengaruhi persepsi politik sipil sehingga membawa urgensi untuk kembali melanggengkan dominasi militer dalam politik. Meskipun Joko Widodo memberikan arahan bagi anggota militer untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi pada faktanya kekuatan militer tetap dibutuhkan oleh presiden untuk mempertahankan posisinya. Hal ini mengingat Joko Widodo bukan berasal dari latar belakang komponen militer dan tidak memiliki kontrol penuh atas partai pengusungnya. Kondisi ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya pemakzulan presiden oleh DPR. Oleh karena itu, Joko Widodo juga bergantung kepada militer

sebagai salah satu basis dukungan terbesarnya (Saputra & Syamsuadi, 2018). Salah satu bukti jika militer masih berpengaruh dalam demokrasi di Indonesia adalah dengan masuknya beberapa purnawirawan militer ke dalam tim pemenangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin di tahun 2019. Keberadaan purnawirawan dalam tim pemenangan tersebut digunakan untuk mobilisasi pemilih untuk mendukung calon presiden yang diusung dengan komando yang lebih terarah (Sukmawan & Pedrason, 2022).

Isu keterlibatan militer dalam jabatan sipil kembali muncul pada saat rapat pimpinan TNI yang dihadiri oleh Joko Widodo pada tahun 2019, dimana pada saat itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan wacana mengenai pos jabatan baru bagi perwira tinggi TNI di internal maupun di kementerian. Hal ini menimbulkan sambutan yang cukup negatif di kalangan masyarakat sipil, karena dianggap dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang telah hilang bersama-sama dengan keruntuhan Orde Baru dan juga dianggap dapat menciderai cita-cita dari Reformasi (Syahrul & Goncing, 2020).

Hal ini berlanjut hingga berkuasanya Joko Widodo, yang mana mempercayakan purnawirawan untuk menduduki posisi politik maupun non-politik penting, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Wiranto sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, hingga beberapa purnawirawan militer yang menduduki jabatan komisaris BUMN di bidang pertambangan. Selain itu, perwira aktif militer juga turut serta menduduki beberapa posisi di lembaga maupun BUMN. Bahkan beberapa perwira militer aktif menduduki jabatan pelaksana tugas kepala daerah (Sukmawan & Pedrason, 2022)

Selain itu, dengan masuknya militer sebagai salah satu bagian penting dalam politik dalam negeri, kondisi ini dapat menciderai demokrasi, yang mana ini juga mencoreng hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari banyaknya intimidasi militer terhadap jurnalis maupun masyarakat sipil. Salah satunya adalah tindakan represif militer yang dikerahkan untuk merepresi masyarakat sipil yang memprotes konsensi lahan untuk kebutuhan industri di Sumatera Barat. Hal ini

diperparah dengan banyaknya kekerasan fisik terhadap masyarakat, jurnalis, maupun aktivis, yang mana di tahun 2019 hingga 2022 sendiri, setidaknya tercatat terdapat 328 kasus kekerasan yang turut melibatkan aktor militer sebagai salah satu dari terduga pelaku (Amnesty Internasional Indonesia, 2023). Kondisi yang terjadi dinilai merusak demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi, yang mana saat ini masyarakat menjadi tidak bebas mengutarakan pendapat dan tuntutan karena adanya tindakan represi dari militer. Di sisi lain, situasi ini juga membuat hubungan antara sipil dengan militer menjadi semakin memburuk karena adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh militer di pemerintahan sipil.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena keberadaan politik dalam demokrasi dengan posisi seperti itu dapat berpotensi mengganggu kedaulatan sipil dalam pemerintahan nasional. Ditambah dengan munculnya konsekuensi lain, seperti penyalahgunaan wewenang, mengingat pejabat politik tersebut juga menduduki jabatan militer atau memiliki pengaruh di kubu militer. Ini dapat berdampak terhadap proses

pembuatan kebijakan hingga munculnya kekuasaan yang otoriter di lembaga atau daerah sehingga mengganggu demokrasi masyarakat.

### **SIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, penulis menemukan jika meskipun Dwifungsi ABRI atau militer sudah dihapuskan sehingga militer aktif tidak dapat menduduki jabatan politik, tetapi keberadaan militer dalam demokrasi Indonesia masih diperhitungkan di era Joko Widodo. Meskipun mayoritas kalangan militer yang menduduki jabatan merupakan purnawirawan militer, tetapi eksistensi militer dalam jabatan politik dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik sipil. Hal ini disebabkan karena militer dapat melakukan mobilisasi dan memiliki wewenang yang besar sehingga kecenderungan penyalahgunaan wewenang tetap ada, seperti terjadinya kekerasan dan intimidasi dari militer terhadap masyarakat, yang mana ini akan berdampak pada tercorengnya demokrasi di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amnesty Internasional Indonesia. 2023. "Rapor Merah HAM Kepresidenan

Jokowi.” Retrieved November 29, 2023 (<https://www.amnesty.id/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/>).

BBC News Indonesia. 2017. “Presiden Jokowi Perintahkan ‘TNI Tak Masuk Kancah Politik Praktis.’” Retrieved November 29, 2023 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41507643>).

Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Efriza. 2019. “Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi.” *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 2(1):167–81.

Leni, Nurhasanah. 2013. “Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia.” *TAPIS* 9(1):31–45. doi: 10.24042/tps.v9i1.1574.

PinterPolitik.com. 2019. “Deal Jokowi-Militer, Akhir Demokrasi?” Retrieved November 29, 2023 (<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/deal-jokowi-militer-akhir-demokrasi/>).

Saputra, Andhik Beni, and Amir Syamsuadi. 2018. “Militer Dan Politik Di Bawah Pemerintahan Joko Widodo.” in *Universitas Abdurrab Pekanbaru*. Vol. 12. Pekanbaru: Universitas Abdurrab.

Sukmawan, Denny Indra, and Rodon Pedrason. 2022. “Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer Di Masa Pemerintahan Joko Widodo.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13(2):274–89. doi: 10.14710/politika.13.2.2022.274-289.

Syahrul, Fathullah, and Muh. Abdi Goning. 2020. “Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia.” *SOSIOHUMANIORA* 6(2):75–86.